

LAPORAN PENELITIAN  
DANA SPP/DPP UNAND 1996/1997  
KONTRAK NOMOR 09/LP-UA/SPP/DPP/D-04/1996

KEMISKINAN DAN ORIENTASI NILAI BUDAYA :  
Kasus Rumah Tangga Penerima Bantuan Program  
Inpres Desa Tertinggal (IDT) Pada 3 (tiga) Desa  
di Sumatera Barat

Oleh :  
Drs. Asmawi, MS

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG, 1996

## Kemiskinan dan Orientasi Nilai Budaya

*Kasus Rumah Tangga Penerima Bantuan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)*

*Pada 3 (tiga) Desa di Sumatera Barat*

(Drs. Asmawi, MS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 33 hlm. SPP/DPP 1996/1997)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria dan prosedur yang dilakukan dalam penentuan penduduk penerima bantuan IDT, isyu dan dampak program IDT, mendeskripsikan profil penduduk penerima IDT serta menganalisis pandangan hidup yang berupa sistem nilai budaya penduduk penerima IDT.

Penelitian dilakukan di 3 (tiga) desa/kecamatan penerima bantuan IDT di Sumatera Barat. Pada setiap desa/kecamatan ditetapkan sebanyak 10 rumah tangga, yang masing-masing rumah tangga diwakili oleh satu orang (suami atau istri) sebagai responden. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara dan observasi. Data hasil penelitian disajikan secara deskriptif dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang dipergunakan dalam penentuan rumah tangga miskin ialah apabila suami-istri atau anggota rumah tangga lainnya tidak mempunyai pekerjaan tetap, asset produksi yang dimiliki relatif sedikit atau tidak ada sama sekali, pendapatan rumah tangga rendah, jumlah anggota rumah tangga relatif besar, tingkat pendidikan rendah, status janda, dan kondisi rumah kurang layak huni.

Masuknya unsur kerabat dalam penentuan rumah tangga miskin dan nilai harga bantuan yang tidak sesuai dengan ukuran setempat merupakan isyu yang berkembang setelah implemmentasi kegiatan Disamping itu, perkembangan usaha penduduk penerima IDT tidak transparan karena kurangnya pengawasan. Sementara, dampak IDT terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga belum begitu kelihatan.

Profil penduduk penerima IDT relatif homogen. Mereka mayoritas berusia antara 30 - 49 tahun. Pendidikan hanya setingkat SD. Umurnya mereka tidak memiliki asset produksi dan beberapa diantaranya mereka yang memilikinya hanya berstatus sebagai warisan dan atau bagi hasil.

Penduduk penerima IDT memiliki pandangan hidup atau orientasi nilai budaya yang cukup bervariasi. Mayoritas dari penduduk penerima IDT yang memiliki orientasi nilai budaya yang cocok bagi kepentingan pembangunan adalah : untuk MK terdapat dalam bidang kehidupan sosial, MW dalam bidang kehidupan keluarga dan ekonomi, dan untuk MM terdapat dalam bidang kehidupan sosial dan agama. Sementara dalam soal dan bidang-bidang kehidupan lainnya itu terdapat penduduk penerima IDT memiliki orientasi nilai budaya yang dapat merintangai pembangunan.

## P E N D A H U L U A N

### Latar Belakang dan Masalah

Tantangan dan rintangan dalam pembangunan masyarakat dapat terletak pada faktor manusiannya. Koentjaraningrat (1969) dalam tulisannya mengemukakan bahwa dalam merencanakan pembangunan ekonomi seyogyannya diperhatikan mengenai manusia, cara berpikir serta tindakannya, disamping syarat ekonomi yang primer, seperti tanah yang cukup luas dan subur, sumber daya alam yang kaya, tenaga kerja yang massal dan murah, kecakapan teknologis dan ekonomis serta modal yang cukup. Lebih lanjut dikemukakan bahwa syarat-syarat ekonomis yang primer ini sangat tergantung kepada mentalitet serta pola-pola tindakan manusia yang melaksanakan dan mengalami pembangunan itu.

Inkeles (dalam Weiner, 1984) mengemukakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah memungkinkan setiap orang untuk mencapai suatu taraf hidup yang layak. Pembangunan itu juga mencakup politik, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kesenian, arsitektur, dan pertumbuhan alat-alat komunikasi. Namun pada akhirnya, ide pembangunan itu mengharuskan adanya perubahan watak manusia - suatu perubahan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berupa pertumbuhan yang lebih lanjut lagi, dan seiring dengan itu, juga merupakan tujuan besar proses pembangunan itu sendiri.

Secara kuantitatif, pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) telah banyak membawa kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurunnya jumlah penduduk miskin misalnya, dari 70 juta atau 60 persen pada tahun 1970 menjadi 27,2 juta atau 15,1 persen pada tahun 1990 merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan sektoral dan regional yang secara

## P E N D A H U L U A N

### Latar Belakang dan Masalah

Tantangan dan rintangan dalam pembangunan masyarakat dapat terletak pada faktor manusiannya. Koentjaraningrat (1969) dalam tulisannya mengemukakan bahwa dalam merencanakan pembangunan ekonomi seyogyannya diperhatikan mengenai manusia, cara berpikir serta tindakannya, disamping syarat ekonomi yang primer, seperti tanah yang cukup luas dan subur, sumber daya alam yang kaya, tenaga kerja yang massal dan murah, kecakapan teknologis dan ekonomis serta modal yang cukup. Lebih lanjut dikemukakan bahwa syarat-syarat ekonomis yang primer ini sangat tergantung kepada mentalitet serta pola-pola tindakan manusia yang melaksanakan dan mengalami pembangunan itu.

Inkeles (dalam Weiner, 1984) mengemukakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah memungkinkan setiap orang untuk mencapai suatu taraf hidup yang layak. Pembangunan itu juga mencakup politik, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kesenian, arsitektur, dan pertumbuhan alat-alat komunikasi. Namun pada akhirnya, ide pembangunan itu mengharuskan adanya perubahan watak manusia - suatu perubahan yang merupakan alat untuk mencapai tujuan yang berupa pertumbuhan yang lebih lanjut lagi, dan seiring dengan itu, juga merupakan tujuan besar proses pembangunan itu sendiri.

Secara kuantitatif, pembangunan ekonomi pada Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) telah banyak membawa kemajuan dan telah berhasil meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurunnya jumlah penduduk miskin misalnya, dari 70 juta atau 60 persen pada tahun 1970 menjadi 27,2 juta atau 15,1 persen pada tahun 1990 merupakan hasil nyata dari pelaksanaan berbagai program pembangunan sektoral dan regional yang secara

## HASIL PENELITIAN

### Kriteria dan Prosedur Penentuan Rumah Tangga Miskin

Menurut pandangan lokal, masyarakat di tiga lokasi penelitian mempunyai bermacam-macam kriteria (tolok ukur) untuk mengatakan seseorang atau sebuah rumah tangga tergolong miskin. Kriteria dimaksud berkaitan dengan berbagai aspek, seperti aspek pendidikan, ekonomi, asset produksi yang dimiliki, pola nafkah dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, berikut akan diuraikan beberapa kriteria yang digunakan masyarakat setempat.

Salah satu kriteria yang digunakan masyarakat setempat untuk menilai rumah tangga tergolong pada miskin, seperti, buruh tani, buruh bangunan dan sejenisnya. Rumah tangga ini memiliki asset produksi yang relatif sedikit yang berupa warisan, bagi hasil dengan status sebagai penggarap dan malahan ada yang tidak punya asset produksi sama sekali, baik berupa lahan, ternak maupun alat tangkapan ikan (kecuali asset produksi yang diperoleh dari bantuan IDT).

Keterbatasan kepemilikan asset produksi serta pola nafkah rumah tangga yang demikian dengan sendirinya pendapatan mereka juga rendah. Hal yang seperti ini terkadang disertai dengan jumlah anggota rumah tangga yang relatif besar, sehingga jurang antara pendapatan dengan kebutuhan anggota rumah tangga makin lebar. Malahan ada yang mengatakan bahwa sebuah rumah tangga dikatakan miskin apabila frekuensi makan anggota rumah tangga kurang dari jumlah frekuensi makan anggota masyarakat pada umumnya. Bila anggota masyarakat biasanya makan 3 (tiga) kali sehari, maka anggota rumah tangga miskin hanya makan 2 (dua) kali sehari.

Sebuah rumah tangga juga dikatakan miskin bila jumlah anak relatif besar. Menurut ukuran setempat jumlah anak dikatakan besar yaitu 3 (tiga) orang atau lebih. Sementara, baik orang tua

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil temuan menunjukkan bahwa kriteria yang dipergunakan dalam penentuan rumah tangga miskin yang layak mendapatkan bantuan program IDT adalah apabila suami-istri atau anggota rumah tangga lainnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Asset produksi yang dimiliki relatif sedikit dan malahan tidak ada sama sekali. Pendapatan rumah tangga relatif rendah maka jumlah anggota rumah tangga yang relatif besar. Pemerolehan pendidikan anggota rumah tangga relatif rendah, yakni hanya setingkat SD. Ukuran lain adalah apabila rumah tangga dikepalai oleh janda.

Sebuah rumah tangga juga dikatakan miskin apabila kondisi fisik dan "isi" rumah kurang/tidak banyak sebagai sebuah rumah tempat tinggal keluarga. Isi rumah relatif sudah "tua", luas relatif kecil yang tidak cocok dengan ukuran jumlah anggota rumah tangga. Rumah masih dileengkapi dengan atap rumbia dan dinding banyu serta kerabat/lati yang terdapat dalam rumah tampak sangat sederhana & kumuh.

### Rekomendasi kriteria dan prosedur

Rekomendasi kriteria dan prosedur penentuan penerima bantuan IDT dan bantuan diberikan dalam wadah LKMD. Bagi rumah tangga yang telah di data tetapi tidak masuk dalam rumah tangga yang mendapatkan bantuan IDT, maka rumah tangga tersebut menjadi prioritas untuk mendapat bantuan IDT berikutnya.

Ada beberapa isyu yang berkembang dalam implemementasi program. Dalam penentuan rumah tangga miskin yang akan menerima bantuan program IDT sempat diwarnai oleh unsur kerabat. Nilai/harga bantuan dinilai oleh penduduk penerima bantuan terlalu tinggi untuk ukuran setempat. Disamping itu, perkembangan usaha penduduk penerima IDT

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmuwi, Wanita, Pendidikan dan Orientasi Nilai budaya : Laporan Penelitian, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1992.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, Panduan Program Inpres Desa Tertinggal Jakarta 1994.
- Best, Ihon W. Research in Education, Third edition, Prentice Hall of India, 1977.
- Bryman, Alan, Quantity and Quality Social Research, Unwin Hyman, London, 1988.
- Buchori, Mochtar dan Wiladi Budiharga, Pola dan Dinamika Orientasi Sosial Budaya di Lima Masyarakat Indonesia, Prisma 3 Maret 1982.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati I Sumatera Barat, Nagari Prioritas dan Desa Miskin di Sumatera Barat, Padang, 1993.
- Geriya, Wayan idk, Pola Orientasi Nilai Budaya Masyarakat Bali Dalam Pembangunan : Laporan Penelitian, Fakultas Sastra Universitas Udayana, 1990.
- Jendrius, Persepsi Kelompok Masyarakat Miskin Terhadap Program Inpres Desa Tertinggal : Studi Kasus Desa Sikilang, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman, (Laporan Penelitian), Fisip Universitas Andalas, 1995.
- Kaisiepo, Mamel, Pandangan Hidup dan Citra Diri, Prisma 3 Maret 1982.
- Kluckhohn, Florence Rukwood and Fred L. Strodtbeck, Variations in Value Orientation, Row, Paterson and Company, New York, 1961.
- Koenjarningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1977.
- , Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, PT Gramedia, Jakarta, 1985.
- , Sejarah Teori Antropologi II, UI-Press, 1990.
- , Rintangan-Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, Siaran Jakarta 1969.
- Koenjaringrat, (Pai) Pemuda Kerja Pergerakan Miskin, NPI, Jakarta, 1985.